



PENGGERGAIAN SALIB MAKAM

Toleransi di Lapisan Bawah Mengkhawatirkan

*Abdul Hamid Razak & Rheisnayu Cyntara
redaksi@harianjogja.com*

JOGJA—Kasus intoleransi terjadi di wilayah Jogja. Salib di pusara penduduk RT 53 RW 13, Purbayan, Kotagede, digergaji warga, Senin (17/12). Kearifan lokal dijadikan alasan. Ini menunjukkan problem besar intoleransi bersemayam di lapisan bawah.

Insiden ini berseleang dua pekan setelah Setara Institute mengeluarkan hasil penelitian yang menyebut Kota Jogja tidak lagi berada di 10 besar kota dengan indeks toleransi rendah. Jumat (7/12) lalu, Setara Institute, organisasi yang mengampanyekan keberagaman, merilis Indeks Kota Toleran 2018.

Indeks toleransi Kota Jogja, yang tahun lalu berada zona merah intoleransi alias di 10 besar kota dengan toleransi terendah, tahun ini membaik. Direktur Setara Institute, Halili, mengatakan Kota Jogja berada di zona

oranye karena pemerintah cukup sigap dalam merespons kasus intoleransi, contohnya dalam penyerangan Gereja St. Lidwina di Sleman, Februari lalu. Penyebab lain naiknya peringkat adalah toleransi di daerah lain yang memburuk.

Namun, penggergajian salib di Tempat Permakaman Umum (TPU) Jambon, Purbayan, Kotagede, mencoreng tingkat toleransi di Kota Jogja. "Ini menjadi sebuah cerminan, bahwa masalah intoleransi di Jogja masih berlangsung dalam masyarakat. Ini sebenarnya intoleransi yang paling kritis, pada lapis sosial terbawah," ujar Halili kepada *Harian Jogja*, Selasa (18/12) malam.

Menurut kajian Setara Institute, ada dua simulasi yang mungkin terjadi dalam kasus ini, yakni provokasi dari eksternal maupun permasalahan internal masyarakat.

► Halaman 6



Harian Jogja/Abdul Hamid Razak

Salib di pusara Tempat Permakaman Umum (TPU) Jambon, Purbayan, Kotagede, digergaji warga, Senin (17/12).

Toleransi di Lapisan...

"Ini sangat kami sayangkan karena sebenarnya Indonesia ada karena semangat toleransi. DNA kita adalah toleransi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir konservatisme agama jadi penyebab masalah intoleransi timbul di level sosial terbawah," ucap dia.

Ada tiga hal krusial yang harus segera dilakukan untuk merawat kebhinekaan. *Pertama*, penanaman pemahaman agama yang moderat di tingkat formal. "Hal ini sering dabaikan," kata dia.

Kedua, peran tokoh-tokoh agama dalam memahami agama secara moderat dan menyebarkan nilai-nilai universal, bukan lantas menyebarkan paham konservatif yang sempit. *Ketiga*, pemerintah harus mengambil peran dengan dua cara, yakni berpihak kepada kelompok minoritas dengan mengeluarkan pernyataan publik yang kuat agar kejadian serupa tak terulang kembali.

"Jangan sampai terjadi lagi *viktimisasi* [menyalahkan korban]. Ini jadi ujian terberat pemerintah, bagaimana mereka bersikap dan ada di mana mereka berdiri," ucapnya.

Hal ini menyayangkan adanya surat pernyataan yang ditulis oleh keluarga almarhum yang menyatakan ikhlas terhadap penggejarian salib. Menurut dia, inilah yang terjadi manakala konservatisme terus dipuk hingga subur. Logika yang bermain dalam kasus ini adalah logika mayoritas yang terus menekan minoritas untuk tunduk.

"Padahal yang harusnya terjadi, hak-hak minoritas wajib dilindungi oleh mayoritas."

Penggejarian Salib

Salib di pusata mendiang Albertus Slamet Sugihardi, di TPU Jambon, Purbayan, Kotagede, dipotong pada Senin kemarin sekitar pukul 14.00 WIB. Sebelum meninggal di usia 60 tahun, Slamet dirawat di RS PKU Muhammadiyah Jogja karena mendadak sakit saat sarapan bubur kacang ijo sekitar pukul 08.00 WIB. "Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Kemudian keluarga berembuk rencana pemakaman," kata Albertus Sunarto, Humas Gereja Santo Paulus Pringolayan Banguntapan, Bantul, Selasa (18/12).

Narto mengatakan awalnya keluarga meminta untuk memakamkan jasad Slamet di TPU dekat gereja. Sayangnya, hal itu tidak bisa dilakukan karena Slamet bukan warga sekitar.

"Setelah ada rembulan dengan

warga di sekitar rumah Pak Slamet, disepakati Pak Slamet dimakamkan di makam kampung [TPU Jambon] yang tidak jauh dari rumahnya," kata Narto.

Sunarto ikut mengurus proses pemakaman salah satu anggota jemaatnya. Dia juga yang ikut berembuk dengan salah seorang tokoh masyarakat di Purbayan, Bedjo Mulyono, agar Slamet bisa dimakamkan di TPU Jambon.

"Awalnya tidak ada masalah. Karena itu makam kampung, siapa saja bisa dimakamkan di sana. Sampai akhirnya sekitar pukul 13.00 WIB, ada semacam reaksi dari warga kampung. Mereka tidak membolehkan Slamet dimakamkan di tengah pemakaman tetapi di bagian pinggir," kata Sunarto.

Warga juga meminta agar keluarga almarhum tidak melantunkan doa-doa sejak pemberangkatan jenazah hingga proses pemakaman di TPU. Keluarga menyanggapi permintaan tersebut asal jasad Slamet segera dikuburkan. "Keluarga juga sepakat. Proses pemakaman berjalan, sampai akhirnya saya mendengar kalau saat salib ditancapkan ke pusara, ada warga yang memotong salib dengan cara menggejari," ujar dia.

Salib yang dipotong tetap ditancapkan, meskipun hanya berbentuk huruf T. Itu menjadi penanda makam Slamet. Saat beranjak malam, keluarga dan kolega Slamet, mantan sopir di PMI Jogja, mulai berdatangan untuk menggelar doa di rumah duka. Masih ada warga yang menolaknya. "Akhirnya, pembacaan doa-doa dilakukan ke gereja ini," kata Sunarto.

Tak hanya itu, prosesi pemakaman Slamet juga tidak seperti pada umumnya. Tidak ada kursi bagi pelayat, tidak ada tenda untuk tempat berteduh. Pengurus kampung beralasan, saat itu semua kursi dan tenda sedang digunakan untuk kegiatan lain.

Tanggapan Masyarakat

Salah seorang tokoh masyarakat RT 53 RW 13 Purbayan Kotagede, Bedjo Mulyono, mengatakan sudah ada kesepakatan antara warga yang diwakili Ketua RT 53 Sholeh Rahmad Hidayat serta Ketua RW 13 Slamet Riyadi dan keluarga mendiang Slamet. Bahkan, kata Bedjo, Maria Sutris Winarni, 63, istri Slamet menandatangani kesepakatan tersebut secara tertulis. "Pernyataan tertulisnya hari ini [Selasa] dengan materai, tetapi kemarin sudah disepakati secara lisan," kata Bedjo.

Bedjo menampik kesepakatan itu adalah bentuk intoleransi. Menurut dia, apa yang dilakukan warga sudah sangat toleran karena jenazah Slamet bisa dikuburkan di TPU tersebut.

"Warga bahkan ikut membantu pemakaman, tetapi memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan simbol agama," ujar dia.

Nur Hudin, tokoh masyarakat lainnya, mengatakan keluarga Slamet sebenarnya sudah ikhlas dan tidak mempersalahkan.

"Ini jadi viral karena ada orang luar yang memviralkan. Keluarga itu sudah ikhlas. Kasihan mereka masih berduka," ujar dia.

Ketua RT 53 RW 13 Soleh Rahmad Hidayat mengakui warga sepakat dan meminta keluarga untuk tidak melakukan ibadah dan berdoa jenazah Slamet di rumahnya. Soleh berdalih itu dilakukan agar tidak memicu adanya konflik. Meski itu melanggar konstitusi, Soleh berkilah kearifan lokal juga harus dihormati. "Kampung ada aturannya. Ada istiadat. Kuburan itu 99 persen kuburan Islam, baru ini saja yang non-Islam. Ini kesepakatan warga dan pengurus kampung," ucap dia.

Menurut dia, warga juga meminta tidak ada simbol Kristen di kompleks pemakaman itu karena mereka berencana menjadikan pemakaman itu khusus muslim. Simbol agama tidak diperbolehkan ada di makam karena menjadi aturan tak tertulis. Jika aturan itu dilanggar, dia khawatir akan menimbulkan konflik di masyarakat. "Ke depan, TPU tersebut akan dijadikan TPU muslim sebagai bagian dari kesepakatan warga," ujar Soleh.

Kapolsek Kotagede Kompol Abdul Rochman mengatakan pemotongan salib tersebut sudah disepakati warga dan keluarga, sebagai bagian dari kesepakatan tidak adanya simbol agama di pemakaman.

"Keluarga setuju. Tetapi di luar muncul isu-isu yang lain-lain," ucap Rochman di Pesantren Nurul Umahat, Kotagede.

Menurut dia, persoalan ini sudah selesai dan tidak perlu dibeberhkan. Adapun Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jogja Abdul Mubtamin heran dengan konflik di Purbayan karena wilayah tersebut merupakan kompleks perumahan.

Dia mengatakan masalah tersebut tidak akan selesai dengan pendekatan keamanan. "Kami akan ada langkah simultan untuk men-*adarkan* masyarakat secara bertahap," kata dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005